



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/857/B.07/HK/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksana Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Surat Pengantar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 000.8.2.2/1067/VI.01/Sek/2024, tanggal 16 Oktober 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-12-2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

**REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1	1.433	1	0	A		
2	- <b>SEKRETARIS</b>	0	1.495	1	(1)	A	2.595	A
3	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1.647	2	(2)	A		
4	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	3.250	3	(3)	A		
5	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.334	2	(2)	A		
6	<b>KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	1	1.451	1	0	A		
7	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	3.248	3	(2)	A		
8	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2.448	2	(1)	A		
9	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3.588	4	(3)	A		
10	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5.507	6	(6)	A		
11	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.692	3	(3)	A		
12	FASILITATOR PEMERINTAHAN	2	1.520	2	0	A		
13	<b>KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET</b>	1	1.346	1	(1)	A		
14	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	3.248	3	(1)	A		
15	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.448	2	(2)	A		
16	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1.608	2	(1)	A		
17	<b>KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN</b>	1	1.416	1	0	A	2.713	A
18	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4.048	4	(1)	A		
19	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	2	3.047	3	(1)	A		
20	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	2.604	3	(1)	A		
21	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1.152	1	(1)	A		
22	<b>KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN</b>	1	1.270	1	0	A	2.435	A
23	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	3.248	3	(2)	A		
24	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.448	2	(2)	A		
25	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1.608	2	(2)	A		
26	<b>KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	1	1.237	1	0	A	2.722	A
27	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	3.248	3	(3)	A		
28	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1.608	2	(1)	A		
29	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	0	3.309	3	(3)	A		
30	<b>KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>	1	1.275	1	0	A	2.515	A
31	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	3.248	3	(1)	A		
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1.608	2	(1)	A		
33	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.690	3	(3)	A		
34	<b>KEPALA UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1	1.498	1	0	A	2.242	A
35	<b>KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA</b>	1	1.371	1	0	A		
36	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	3.248	3	(2)	A		
37	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1.912	2	(2)	A		

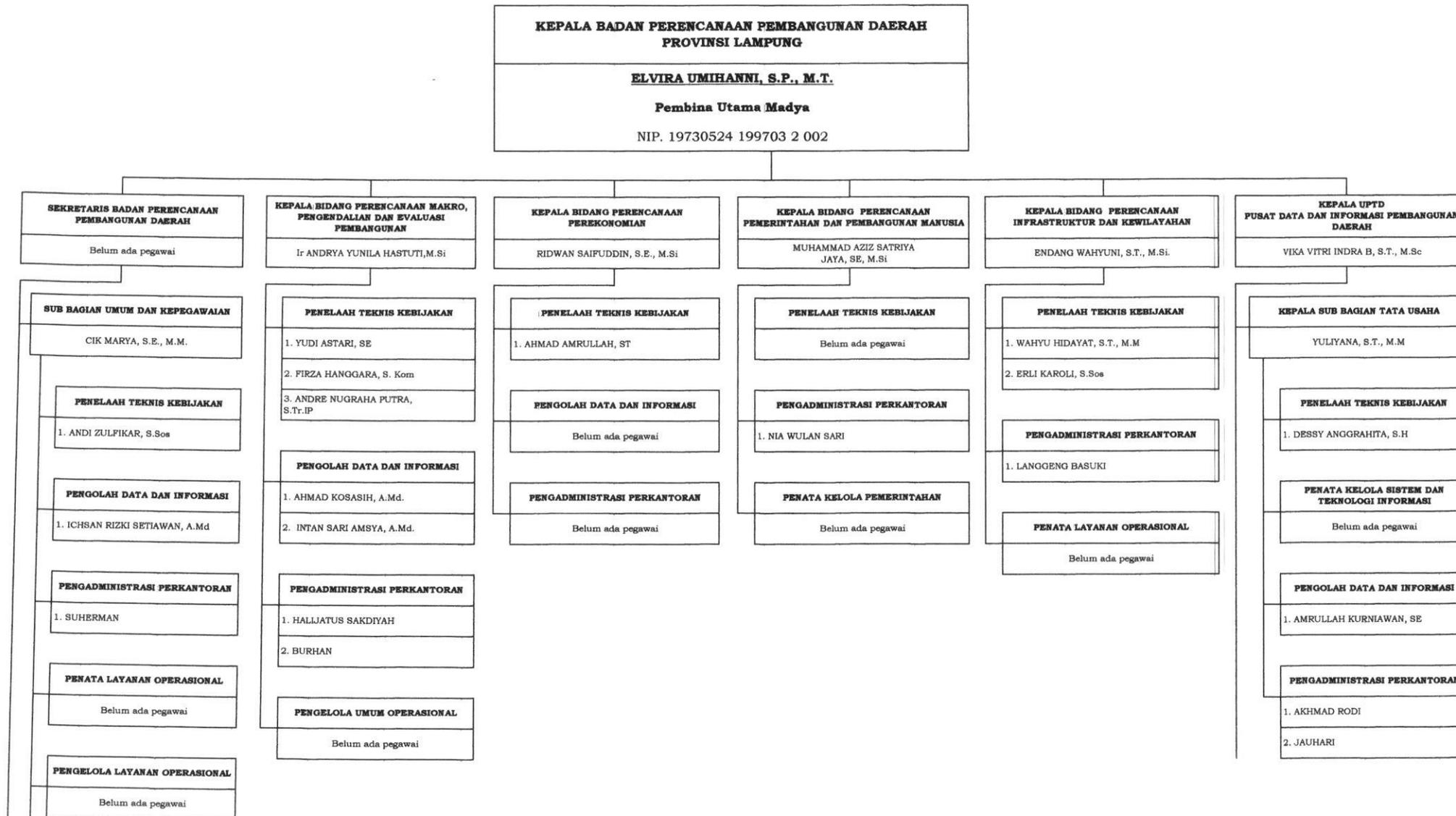
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2.448	2	(1)	A		
39	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1.608	2	0	A		
40	<b>KEPALA SEKSI DATA STATISTIK</b>	1	1.493	1	0	A		
41	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	3.248	3	(1)	A		
42	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2.448	2	(1)	A		
43	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1.608	2	0	A		
44	<b>KEPALA SEKSI DATA GEOSPASIAL</b>	1	1.386	1	0	A		
45	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	3.248	3	(3)	A		
46	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.448	2	(2)	A		
47	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1.608	2	(1)	A		
48	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	3.313	3	(3)	A		
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>111.2120</b>	<b>106</b>	<b>(66)</b>		<b>2.537</b>	<b>A</b>

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

**2.1 PETA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALIS JABATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



<b>FASILITATOR PEMERINTAHAN</b>
1. M. FAREZA AKBAR, S.Ty.I.P
2. SARAH NABILA PUTRI, S.Tr.I.P
<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET</b>
NORMA YUNITA, S.IP., M.M.
<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>
1. SYAHRIL JAYA SAPUTRA, ST
2. MALIK SYARIFUDIN, S.IP
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>
Belum ada pegawai
<b>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</b>
1. MUJIYONO
<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>
Belum Ada Pegawai
<b>PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>
Belum Ada Pegawai
<b>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</b>
Belum Ada Pegawai

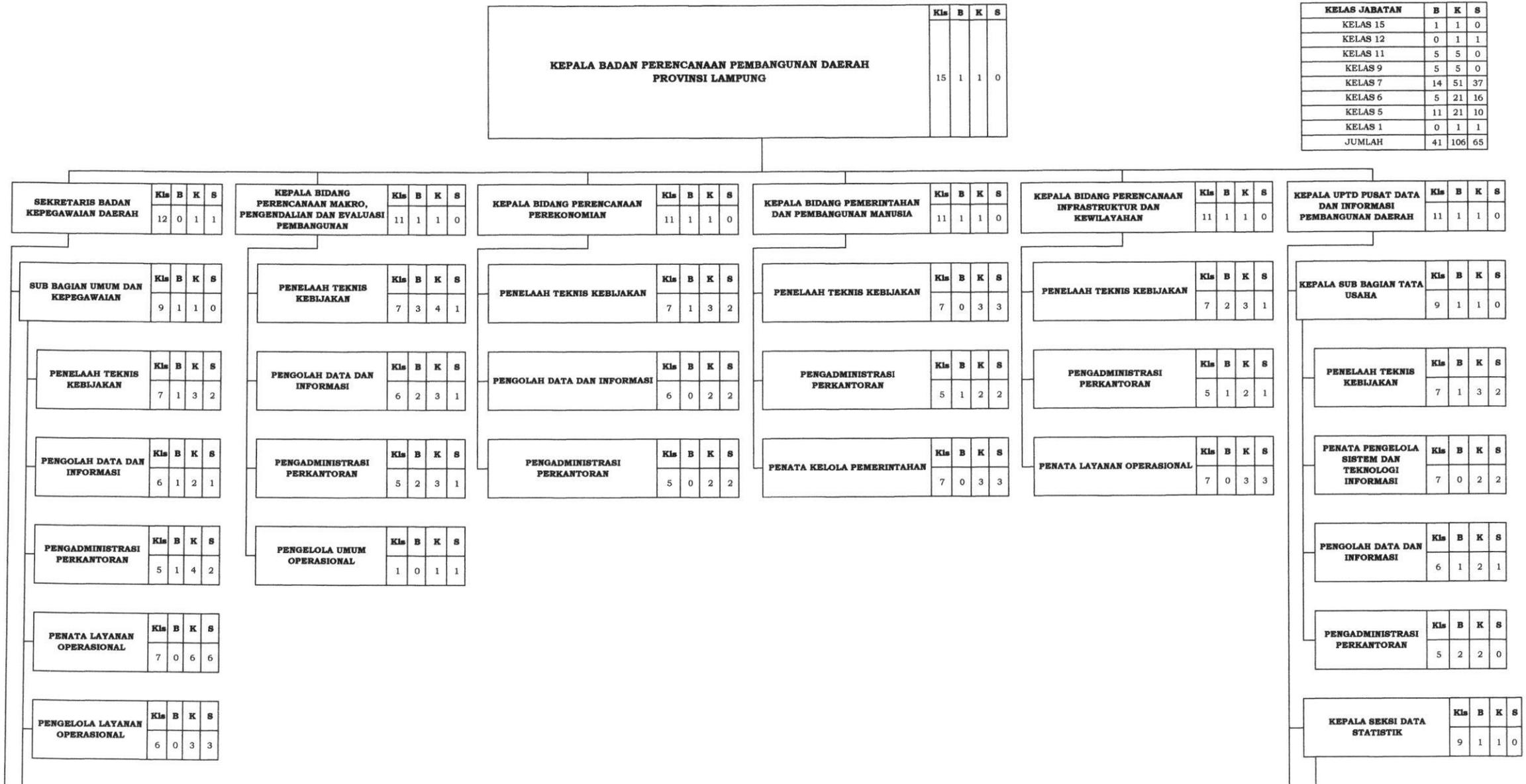
<b>KEPALA SEKSI DATA STATISTIK</b>
DENY ANDRY, S.Si., M.M
<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>
1. YULIA FITRI, S.Kom
2. DHANIA APISHA, S.STP
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>
1. NAFIAH PRATIWI, A.Md
<b>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</b>
1. NASARUDDIN
2. SUGIMAN
<b>KEPALA SEKSI DATA GEOSPASIAL</b>
MUHAMMAD RIDUWAN PASRA, S.E., M.B.A
<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>
Belum ada pegawai
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>
Belum ada pegawai
<b>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</b>
1. BAMBANG ERY SUGIHONO
<b>PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL</b>
Belum ada pegawai

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



**SAMSUDIN**

**3. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



KELAS JABATAN	B	K	S
KELAS 15	1	1	0
KELAS 12	0	1	1
KELAS 11	5	5	0
KELAS 9	5	5	0
KELAS 7	14	51	37
KELAS 6	5	21	16
KELAS 5	11	21	10
KELAS 1	0	1	1
JUMLAH	41	106	65

FASILITATOR Pemerintahan	Kls	B	K	S
	7	2	2	0

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	Kls	B	K	S
	9	1	1	0

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Kls	B	K	S
	7	2	3	1

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	Kls	B	K	S
	6	0	2	2

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Kls	B	K	S
	5	1	2	0

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Kls	B	K	S
	7	0	2	2

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Kls	B	K	S
	7	0	3	3

PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Kls	B	K	S
	7	0	2	2

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Kls	B	K	S
	7	2	3	1

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	Kls	B	K	S
	6	1	2	1

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Kls	B	K	S
	5	2	2	0

KEPALA SEKSI DATA GEOSPASIAL	Kls	B	K	S
	9	1	1	0

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Kls	B	K	S
	7	0	3	3

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	Kls	B	K	S
	6	0	2	2

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Kls	B	K	S
	5	1	2	1

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Kls	B	K	S
	6	0	3	3

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN